



DIPLOMASI TNI AL DI KAWASAN PASIFIK SELATAN DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT ISU INTERNASIONALISASI PERMASALAHAN PAPUA

Hendra Kurniawan, Rully Riono, I Made Wira

Program Magister Terapan Strategi Operasi Laut,

Sekolah Staf Dan Komando Angkatan Laut, Indonesia

Abstrak

Gerakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua seperti halnya yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka merupakan gangguan terhadap stabilitas keamanan Nasional yang dapat mengancam integritas NKRI. Upaya yang dilakukan oleh simpatisan organisasi Papua Merdeka bukan hanya melalui tindakan kekerasan dan provokasi di dalam negeri, tetapi juga melaksanakan diplomasi ke dunia Internasional untuk mencari dukungan. Aksi diplomasi dalam mencari dukungan internasional dan sentimen geografi dengan mengangkat isu solidaritas rumpun Melanesia menyebabkan adanya dukungan dari beberapa negara di kawasan Pasifik Selatan salah satunya oleh Vanuatu yang selalu mengangkat isu Pelanggaran HAM di Papua dalam forum-forum Internasional. TNI AL adalah bagian dari kekuatan bangsa dalam bidang pertahanan yang memiliki salah satu tugas diplomasi seperti yang tertuang pada UU Nomor 34 tahun 2004 yaitu melaksanakan tugas diplomasi TNI AL dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. Kekuatan diplomatis dari Angkatan Laut dapat mendukung kebijakan negara khususnya pada masa negosiasi maupun dalam interaksi internasional. Dalam beberapa kejadian yang dilakukan oleh beberapa negara, diplomasi Angkatan Laut digunakan sebagai fungsi prestise, yaitu kekuatan Angkatan Laut mampu membentuk ketenangan psikologis dalam tingkat domestik, memproyeksikan citra umum suatu negara, meningkatkan reputasi dan kredibilitas militer suatu negara, dalam pelaksanaan diplomasi TNI AL ke Kawasan Pasifik Selatan perlu adanya suatu kajian tentang sasaran yang ingin dicapai, peluang dan kendala serta strategi yang digunakan.

Kata Kunci: Diplomasi TNI AL, Kawasan Pasifik Selatan, Organisasi Papua Merdeka, Vanuatu, Melanesian Spearhead Group (MSG).

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat disebutkan bahwa tujuan nasional meliputi: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Sehingga diperlukan suatu situasi serta kondisi yang dapat menjamin terselenggaranya seluruh proses untuk mewujudkan tujuan, cita-cita, dan kepentingan nasional melalui pembangunan nasional yang terencana dan terprogram. Kedua, membebaskan rakyat Indonesia dari kebodohan dan kemiskinan yang diwujudkan dengan masyarakat yang adil dan makmur dalam setiap sendi kehidupan. Ketiga, sebagai bagian dari masyarakat dunia (internasional) maka harus ikut berperan serta secara aktif mendukung terwujudnya suatu dunia yang damai, serasi, selaras, dan seimbang dalam pergaulan internasional (Kusmanto, 2016). Kondisi keamanan suatu bangsa tidak terlepas dari keterkaitan antara geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan. Oleh sebab itu, keamanan nasional merupakan suatu sistem dengan unsur-unsur yang ada di dalamnya saling berkaitan, saling mempengaruhi, saling berinteraksi, serta saling menentukan, sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan selalu diperhitungkan dalam menentukan arah pencapaian tujuan nasional. bertolak pada amanat konstitusi dan kemungkinan ancaman yang dihadapi dari waktu ke waktu yang dinamis sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, maka stabilitas keamanan nasional harus dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam

membangun bangsa. Pada perjalanan Sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan berbagai dinamika tantangan yang dihadapi berubah-ubah dari waktu ke waktu, mulai dari mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dari pengaruh ideologi komunisme, mempertahankan integritas, menyukseskan pembangunan nasional dan melaksanakan demokrasi dan pemerintahan yang baik dalam pembangunan nasional saat ini dan masa yang akan datang. Setelah permasalahan Aceh dapat diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia melalui perjanjian Helsinki pada tahun 2005, maka Papua menjadi salah satu fokus Pemerintah dalam stabilitas keamanan nasional guna mempertahankan integritas wilayah. Gerakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua seperti halnya yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka merupakan gangguan terhadap stabilitas keamanan Nasional yang dapat mengancam integritas wilayah. Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah gerakan prokemerdekaan Papua yang mulanya adalah reaksi beberapa orang Papua atas sikap Pemerintah Indonesia sejak 1963 (Amidoni, 2018). Dalam mencapai tujuannya mereka melakukan aksi kriminal bersenjata, berbagai tindakan kekerasan dimulai dari penculikan, perusakan fasilitas hingga pembunuhan terhadap sipil maupun militer dilakukan melalui Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM). Meskipun sesuai dengan hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969 warga Papua memilih untuk bergabung dengan Indonesia dan keputusan tersebut sebagaimana telah ditetapkan oleh PBB dalam resolusi nomor 2524 (Pratomo, 2019), akan tetapi hingga saat ini masih sering terjadi upaya baik dari dalam maupun luar negeri yang secara terus menerus mendorong kemerdekaan Papua. Gerakan ini dibentuk atas dasar

prinsip ingin memerdekakan Papua dari Indonesia ini terjadi sebagai akibat pernyataan Belanda pada masa setelah kemerdekaan dan berpengaruh hingga pada ketidakpuasan terhadap PEPERA yang dibuat dimana ada sebagian masyarakat Papua yang merasa tidak diikutsertakan dalam perumusan dan penetapan perjanjian tersebut. Menurut undang-undang hukum Indonesia, OPM dapat dikategorikan sebagai organisasi yang dilarang di Indonesia karena memiliki ideologi untuk memisahkan diri dari Indonesia sebagaimana tertera pada pasal 87 KUHP tentang perbuatan untuk melakukan suatu makar.. OPM dapat disebut juga sebagai Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) karena ingin memisahkan diri dari Indonesia dan menciptakan pemerintahan baru. Pada tahun 2021 pemerintah telah menetapkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok tersebut juga dimasukkan dalam gerakan terorisme. Aksi mereka bukan hanya melalui gerakan kriminal bersenjata tetapi juga melakukan diplomasi ke beberapa negara untuk mendukung aksinya. Diplomasi yang dilaksanakan melalui pemimpinnya Benny Wenda dengan mendirikan *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP), salah satunya melalui organisasi *Melanesian Spearhead Group* (MSG) yaitu organisasi negara-negara yang berada di Kawasan Pasifik Selatan (Damarjati, 2019). Organisasi tersebut memiliki visi tersirat yaitu dekolonisasi serta kebebasan bangsa Melanesia dengan upaya mengembangkan identitas budaya, politik, sosial dan ekonomi masyarakat Melanesia. Diplomasi ULMWP pada kenyatannya mendapat simpati, khususnya dari Vanuatu, yang sejak tahun 2015 selalu secara terus menerus dan konsisten menyuarakan kemerdekaan Papua di dalam forum-forum resmi termasuk sidang PBB (Mukarom, 2020). Meskipun hal ini selalu dibantah oleh Pemerintah

Indonesia melalui perwakilan di PBB, akan tetapi tidak merubah sikap Vanuatu. Selain Vanuatu ada beberapa negara lain dan juga beberapa organisasi internasional di Pasifik Selatan yang memiliki sikap yang sama terhadap Papua.

Pasifik Selatan merupakan kawasan dengan karakteristik geografis terdiri dari negara-negara pulau kecil (*microstate*) dan kepulauan dengan luas 30 juta km² mulai dari Papua Nugini sampai ke kepulauan Pitcairn di lautan yang luas samudera Pasifik bagian selatan. Menurut penelitian penduduk awalnya di Kepulauan Pasifik Selatan pada awalnya dihuni oleh imigran-imigran dari Asia Tenggara yang kemudian dikenal sebagai suku bangsa Melanesia, Mikronesia dan Polinesia. Negara-negara dalam kawasan ini pada umumnya belum dapat memanfaatkan nilai ekonomis dari potensi sumber daya alam yang dimiliki secara maksimal. Karena terbatasi dalam sumber daya manusia. Di satu sisi, sistem ekonomi negara-negara ini telah membuka pasar mereka secara bebas dan juga mereka terbuka untuk menerima bantuan asing serta investasi negara lain. Negara-negara yang selama ini memiliki kepentingan terhadap Pasifik Selatan adalah Australia, New Zealand, Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Jepang, dan Rusia serta Tiongkok yang juga mulai mengembangkan pengaruhnya di Kawasan tersebut. Dalam menghadapi permasalahan dukungan beberapa negara di Pasifik Selatan terhadap aktifitas kemerdekaan Papua, Pemerintah Indonesia selanjutnya membuka diplomasi ke negara-negara Pasifik Selatan. Pada tahun 2012 Indonesia menjadi bagian dalam MSG sebagai *observer* dan setelah tiga tahun berhasil meningkatkan status menjadi *associate members* (Tarigan, 2015). Sebagai bentuk keseriusan diplomasi yang dilaksanakan, pada tahun 2014 Indonesia berkomitmen untuk

memberikan bantuan keuangan sebesar US \$ 20 juta dalam bentuk program peningkatan kapasitas kepada negara-negara di kawasan Pasifik Selatan serta pada tahun 2015 menjadi tuan rumah festival kebudayaan Melanesia yang diselenggarakan di Kupang, NTT (Muhammad, 2014).

Dalam menjalin hubungan dengan negara lain Indonesia memiliki Politik luar negeri Bebas Aktif yang merupakan amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif juga dapat dimaknai sebagai prinsip dasar negara dalam menjalankan hubungan dengan negara-negara lain. Untuk itu, sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, negara Indonesia bebas dan tidak memiliki batasan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara lain yang dianggap sebagai negara sahabat sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Sementara itu Pasifik Selatan merupakan wilayah yang strategis bagi Indonesia. Berdasarkan pendekatan geostrategi lingkaran konsentris atau *concentric circle* dalam menetapkan prioritas kawasan dalam melaksanakan politik luar negeri, kawasan pasifik selatan yang secara geografis berbatasan langsung dengan Indonesia sudah seharusnya menjadi prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. Lingkaran konsentris *concentric circle* merupakan istilah yang pertama kali dicetuskan oleh mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas, yaitu merujuk pada instrumen yang digunakan untuk menganalisis masalah-masalah internasional, serta untuk menempatkan posisi Indonesia dalam menghadapi masalah internasional. Dalam pendapat tersebut terdapat tiga dimensi yang dipakai dalam lingkaran konsentris, pertama ialah dimensi regional yaitu berkaitan dengan letak geografis Indonesia, kedua ialah dimensi organisasional yaitu merujuk pada posisi Indonesia dalam tatanan internasional,

serta yang ketiga adalah dimensi fungsional yang berupa peran Indonesia dalam tatanan internasional. Pasifik Selatan merupakan *sphere of primary strategic interest* baik secara politik, sosial budaya, maupun ekonomi serta mempunyai posisi strategis bagi upaya menjaga kedaulatan dan mempertahankan NKRI (Raharjo, 2019). Arti penting Pasifik Selatan bagi Indonesia dilihat dari aspek kawasan merupakan salah satu prioritas dalam pertimbangan politik luar negeri Indonesia selain kawasan Asia Tenggara. Stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut penting artinya bagi Indonesia yang sedang giat melakukan pembangunan di bidang maritim. Suatu keadaan tidak stabil di kawasan pasifik dapat memberikan pengaruh yang bersifat negatif terhadap stabilitas keamanan dan ketahanan nasional Indonesia. Kerjasama di Kawasan Pasifik Selatan juga merupakan strategi untuk merangkul negara-negara di Kawasan tersebut dalam rangka mengatasi isu permasalahan di Papua. Pada suatu tataran strategis, bedasarkan dengan Kebijakan Pertahanan Negara tahun 2020, Kemhan telah menetapkan kawasan Pasifik Selatan sebagai salah satu prioritas dalam diplomasi pertahanan Indonesia (Biro Humas Setjen Kemhan, 2021). Salah satu tindak lanjutnya adalah telah ditandatanganinya *Defence Cooperation Agreement (DCA)* antara Indonesia dan Fiji yang selanjutnya membuka akses bagi pelaksanaan kerjasama, program peningkatan kapasitas, pelatihan dan penelitian militer (Ministry of Communication, 2017). Pada era globalisasi dan kemajuan dalam bidang informasi gerakan-gerakan populisme dan HAM dunia menysar perkembangan ekonomi dan politik di Papua. peristiwa lepasnya Timor Timur seharusnya menjadi *crucial point* dalam pelaksanaan diplomasi internasional kita, kejadian tersebut dapat menjadi

pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana pentingnya diplomasi dalam menjaga kedaulatan NKRI.

Dalam era informasi dengan media sosial yang semakin massif, terbuka dan vulgar, bukan hanya perlawanan bersenjata yang menjadi musuh bangsa. Sekarang dunia dihadapkan pada berbagai kekuatan non tradisional yang sifatnya lemah (*soft power*), namun sangat efektif di dalam menyampaikan pesan dan narasi yang menggugah kesadaran publik. Oleh karena itu diperlukan adanya bentuk diplomasi yang komprehensif dalam menjalin hubungan dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. beberapa jenis diplomasi yang dapat dilakukan sesuai dengan perkembangannya yaitu *preventive diplomacy*, *public diplomacy*, *offensive diplomacy*, *secret diplomacy* serta berbagai jenis diplomasi lainnya (Pratiwi, 2017). *preventive diplomacy* dan *public diplomacy* merupakan jenis diplomasi yang dapat dilaksanakan di masa damai dalam rangka melaksanakan diplomasi dan untuk menciptakan pengaruh serta menjalin kerjasama di Kawasan Pasifik Selatan. *Preventive diplomacy* memiliki tujuan untuk meredakan berbagai pihak yang terlibat dalam masalah agar tidak menimbulkan perang atau eskalasi yang meningkat (Donald M. Snow, 2000), Sedangkan untuk *Public diplomacy* adalah diplomasi yang biasanya digunakan oleh pemerintah untuk mendapatkan simpati dan dukungan rakyat atau diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat di negaranya atau kepada masyarakat di negara lain (d'Hooghe, 2007).

TNI AL adalah bagian dari kekuatan bangsa dalam bidang pertahanan yang memiliki salah satu tugas diplomasi seperti yang tertuang pada UU Nomor 34 tahun 2004 pasal 9 point c yaitu melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka

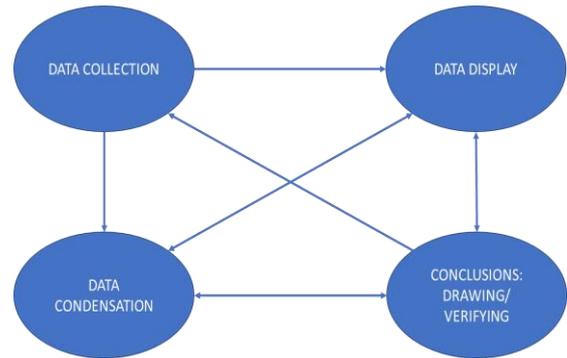
mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. Tugas diplomasi ini sangat erat kaitannya dalam menjalin hubungan antar negara baik hubungan Bilateral maupun Multilateral yang sudah dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut sendiri memiliki Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) sebuah Kapal Perang Republik Indonesia (KRI). Alutsista yang berupa KRI merupakan kekuatan inti yang dimiliki oleh sebuah Armada, sedangkan sebuah Armada itu sendiri adalah kekuatan inti dari Angkatan Laut. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan dalam buku *Naval Historical Foundation "The Naval fleet or Armada is the main core of the Navy. The highlight in the Navy is foward from the sea which is showed by the presence of the Naval fleet"* (Holland, 2012). Seperti halnya juga yang disampaikan oleh Commander Kevin Rowlands, dari *Royal Navy*, dalam bukunya *Naval Diplomacy in Strategic Thought*, "*The political (or diplomatic) role of sea power has always been important and, arguably, far more commonly exercised than its wartime uses"* (Rowlands, 2012). Pada era Globalisasi saat ini dalam melaksanakan tugas diplomasinya, TNI Angkatan Laut harus selalu mengedepankan hubungan antar negara bukan hanya sekedar menunjukkan kekuatan yang dimiliki semata. TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan NKRI dapat melaksanakan Konsep Diplomasi Angkatan Laut (*Naval Diplomacy*) yang dikemukakan oleh George Till dengan tahapan: *Presence* (Kehadiran), *Picture Building*, *Coalition Building*, *Coercion* (Till, 2018).

Dalam konteks masa damai maka tahapan *Naval Presence* dan *Naval Picture Building* dapat dilaksanakan selaras dengan Diplomasi Preventif dan Diplomasi publik dalam menjalin hubungan di kawasan Pasifik Selatan. Diplomasi TNI AL dengan harus selalu berpedoman dan mendukung arah serta

kebijakan politik luar negeri pemerintah, selanjutnya dapat meningkatkan pengaruh dalam pemilihan opsi penawaran kerja sama. Pelaksanaan Diplomasi TNI AL di kawasan Pasifik Selatan diharapkan dapat mendukung strategi Pemerintah dalam menciptakan hubungan yang harmonis dengan negara-negara di kawasan tersebut. Hal tersebut diharapkan dapat meredam isu tentang pelanggaran HAM di Papua yang selalu dilontarkan oleh beberapa negara di Pasifik selatan pada forum-forum internasional. Oleh karena itu diperlukannya suatu strategi diplomasi TNI AL yang tepat di kawasan Pasifik Selatan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif akan memunculkan data dalam bentuk kata-kata. Data tersebut merupakan hasil yang dikumpulkan dalam berbagai macam cara (studi literatur, observasi, wawancara, intisari, dokumen) kemudian diproses melalui pencatatan, pengetikan dan penyuntingan. Metode ini akan melakukan interpretasi data yang diperoleh secara rasional dan objektif, yang mana akan mengaitkan antara variabel agar dapat memberikan pandangan yang konkret dan detail. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014), teknik analisis data seharusnya disesuaikan dengan gambar interaktif sebagaimana disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1. Teknik Analisa Data
 Sumber: Huberman dan Saldana, 2014.

PROSES	KEGIATAN
Pengumpulan data	Pengumpulan informasi melalui sumber primer dan sekunder. Sumber primer: hasil korespondensi dengan para expert. Sumber sekunder: Studi pustaka (buku, Jurnal dan media daring).
Kondensasi data	Perumusan rangkuman, pembuatan transkrip wawancara serta pemilihan data terkait Diplomasi TNI AL di Pasifik selatan guna menjaga keaulatan NKRI.
Penyajian data	Pemilahan dan pengategorisasian informasi melalui kategori berikut: Kondisi permasalahan; Diplomasi TNI AL.
Penarikan kesimpulan	Pemaknaan aktivitas diplomasi TNI AL di pasifik selatan sebagai langkah untuk menjaga kedaulatan.

Gambar 2. Proses dan analisis data
 Sumber: Huberman dan Saldana, 2014.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dibahas tentang gambaran obyek penelitian (kondisi wilayah dan potensi ancaman terhadap kedaulatan terhadap di pasifik selatan), analisis data (faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diplomasi TNI AL di pasifik selatan) dan pembahasan.

Gambaran obyek penelitian

Ditinjau secara geografis Pasifik Selatan merupakan Kawasan Negara-negara yang berada di samudera Pasifik Bagian selatan, yang sebagian besar terdiri atas negara pulau dan kepulauan kecil (*microstate*) yang terbentang di samudera pasifik bagian selatan. Kepulauan Pasifik pada awalnya dihuni oleh suku bangsa Melanesia, Mikronesia dan Polinesia. Melanesia terdiri dari dari gugusan pulau di selatan hingga barat daya samudera Pasifik, yaitu Papua

Nugini, Solomon Islands, Vanuatu, Fiji, dan New Caledonia. Mikronesia berada di bagian barat Samudera Pasifik terdiri dari delapan negara, yakni Micronesia, Guam, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Northern Mariana Islands, Palau, dan Wake Islands. Polynesia terdiri dari gugusan pulau di tengah selatan samudera hindia seperti Hawaii, Selandia Baru, Samoa, Samoa-Amerika, Tonga, Tuvalu, Kepulauan Cook, Polinesia-Perancis serta Pulau Easter. Secara ekonomi, negara-negara di pasifik selatan dapat dikategorikan negara-negara kurang berkembang. Hampir semua negara di kawasan pasifik selatan merupakan negara bekas koloni negara-negara barat, bahkan ada beberapa negara yang masih merupakan koloni dari negara-negara barat. Ditinjau dari bidang perekonomian kawasan ini belum dapat mengolah nilai ekonomis dari potensi sumber daya alam yang dimiliki secara maksimal. Di satu sisi, sistem ekonomi negara-negara ini telah membuka pasar mereka secara bebas dan juga mereka terbuka untuk menerima bantuan asing serta investasi negara lain. Negara-negara yang selama ini berkepentingan terhadap Pasifik Selatan adalah Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Jepang, Australia, New Zealand, dan Rusia serta Tiongkok yang juga mulai mengembangkan pengaruhnya di Kawasan tersebut. Sektor pariwisata itu sangat penting bagi banyak negara Pasifik. Bagi sebagian, pariwisata adalah salah satu dari beberapa sektor dalam diversifikasi ekonomi negara. Sementara bagi yang lain, pariwisata adalah sumber utama ekonomi negara. Untuk Palau, Vanuatu dan Fiji, sektor ini mewakili sekitar 40% dari PDB, dan dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakatnya, dalam bentuk pekerjaan formal, bagi sebagian besar warganya.

Dinamika Kawasan Pasifik Selatan bagi Indonesia.

Dengan mulai berkembangnya globalisasi menyebabkan negara-negara kawasan Pasifik Selatan ini mulai membuka peluang dengan memanfaatkan globalisasi ini dengan mencari bantuan ke negara-negara lainnya terutama negara-negara yang pernah menjajah kawasan tersebut seperti Prancis, Amerika Serikat, dan Inggris. Hal ini mereka lakukan guna memperkenalkan negara mereka sekaligus membantu perekonomian negara dan masyarakatnya. Dari segi geografi sosial dan budaya, Indonesia dengan negara-negara yang ada di kawasan Pasifik Selatan memiliki berbagai kesamaan mulai dari orang dan juga kondisi alamnya serta masalah yang ada di dalam negaranya seperti isu-isu rasial yang sangat rentan saat ini. Adanya sentimen geografis dan etnis di kawasan Pasifik Selatan menjadi sebuah masalah yang menyangkut diplomasi. Seperti yang dilakukan Vanuatu yang kembali mengungkit masalah Papua dalam beberapa forum internasional. Sehingga opini yang tersebar di kawasan tersebut adalah Indonesia melaksanakan penjajahan atau aneksasi di Papua. Hal ini sudah terjadi sejak lama dimana negara-negara tersebut memiliki ikatan solidaritas antar sesama ras Melanesia sehingga mereka sangat mendukung kemerdekaan Papua dan hanya melihat sejarah bergabungnya. Berikut data tentang dukungan terhadap gerakan Papua merdeka yang dilakukan oleh negara-negara di pasifik selatan beberapa tahun terakhir:

1. Pada Desember 2014, Vanuatu menjadi tuan rumah pada pembentukan *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP). ULMWP merupakan payung bagi tiga organisasi Papua pendukung kemerdekaan yang sebelumnya berjalan masing-masing: WPNCL, Negara Federasi Republik Papua

Barat (NFRPB), dan *West Papua National Parliament* (WPNP).

2. Pada tahun 2016, dalam forum dewan HAM PBB, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua.
3. Pada tahun 2017, Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tuvalu dan Grenadines menyampaikan tuduhan tentang pelanggaran HAM oleh Indonesia di Papua dalam sidang umum PBB.
4. Pada tahun 2018, Vanuatu kembali mempersoalkan tentang pelanggaran HAM di Papua dalam sidang PBB.
5. Pada tahun 2019, Vanuatu meminta PBB untuk mengecek langsung kondisi di Papua.
6. Pada tahun 2020, Vanuatu kembali mengangkat isu pelanggaran HAM di Papua pada sidang umum PBB.

Kondisi ini dapat menjadi sebuah hambatan dalam menjalin kerjasama bilateral maupun multilateral di kawasan tersebut. Hal tersebut dapat mengganggu kedaulatan Negara Republik Indonesia dan dapat memutus hubungan kerjasama antar dua pihak. Untuk mengatasi masalah tersebut Indonesia telah melakukan berbagai upaya supaya hubungan kerjasama bisa terjalin dengan baik mengingat hubungan tersebut dapat memberi dampak positif bagi stabilitas keamanan dan kedaulatan Indonesia maupun negara-negara kepulauan Pasifik.

Diplomasi TNI AL di Kawasan Pasifik Selatan.

Ken Booth dengan bukunya *Navies and Foreign Policy* sangat

signifikan menjelaskan tentang trinitas fungsi angkatan laut sehingga telah banyak dipergunakan sebagai doktrin Angkatan Laut di berbagai negara. Menurut Booth, Angkatan Laut memiliki tiga fungsi yaitu fungsi militer, polisionil dan diplomasi. Fungsi diplomasi adalah fungsi paling khas dari Angkatan Laut. Fungsi ini berkaitan dengan kebijakan luar negeri dalam pengerahan kekuatan Angkatan Laut dalam melaksanakan hubungan antar negara. Kekuatan diplomatis dari Angkatan Laut dapat mendukung kebijakan negara dalam masa negosiasi maupun dalam interaksi internasional. secara umum Pengerahan Angkatan Laut dalam masa negosiasi dipercaya dapat mempengaruhi output dari proses negosiasi tersebut. Selain itu, diplomasi Angkatan Laut juga dapat berperan sebagai manipulasi, yaitu memperkuat posisi tawar, menciptakan ancaman pihak ketiga (*proxy threats*), serta dengan memperlihatkan kekuatan Angkatan Laut di laut lepas untuk menunjukkan eksistensi negara dan menarik perhatian dunia Internasional. Fungsi lain dari diplomasi Angkatan Laut sering digunakan oleh Angkatan Laut dunia adalah fungsi *prestise*. Kekuatan Angkatan Laut mampu membentuk kondisi psikologis di tingkat domestik, memproyeksikan kekuatan armada laut yang mengesankan dapat membentuk citra umum negara, sehingga disegani oleh negara lain. *Prestise* juga dapat digunakan untuk kepentingan keamanan negara melalui peningkatan reputasi dan kredibilitas militer, citra sebagai negara yang potensial untuk dijadikan aliansi atau untuk perbantuan bidang militer, sebagai penghormatan terhadap negara dalam berbagai pengambilan keputusan internasional serta kecenderungan untuk memenangkan konflik. Beberapa manfaat tersebut memiliki implikasi positif terhadap keamanan negara yang diperoleh melalui *prestise* internasional. Selanjutnya dalam diplomasi, *prestise* juga dapat digunakan dalam berbagai

bentuk, seperti dijelaskan oleh Booth, *It can oil the efforts of a country's negotiator. A prestigious state is likely to be invited to major international conferences. It is likely to be listened to with more diplomatic courtesy, for its words will be invested with a special credibility and authority... A prestigious state will tend to get its way because other states will tend to defer to its 'natural' authority. It may become a nodal point in diplomatic intercourse. It will claim, and be accorded, the right to be interested, involved, and informed on all issues it thinks relevant. Its propaganda will be relatively effective... In terms of the promotion of the national interest therefore, the advantages of being thought to possess prestige appear overwhelming. Prestige brings respect, authority, deference and responsiveness. It produces efficient power and influence in foreign policy.*

Berbagai keuntungan dapat diperoleh oleh suatu negara dari dari fungsi prestise dalam upaya diplomasi. Dalam suatu perundingan, negara yang memiliki prestise akan lebih sering dilibatkan akan memberikan keuntungan bagi negara untuk tetap eksis dengan isu dan perkembangan internasional sehingga negara dapat mengambil kesempatan dari kondisi tersebut. selanjutnya, diplomasi yang dilaksanakan negara yang memiliki prestise seringkali ditanggapi dengan keramahan diplomatik oleh pihak lain karena dianggap sebagai pihak yang memiliki kekuatan dalam menyelesaikan perbagai persoalan. Negara yang memiliki prestise juga memiliki kekuatan untuk membentuk propaganda yang efektif dan biasanya didengar oleh aktor-aktor internasional. secara khusus dalam konteks diplomasi, *prestise* meningkatkan penghormatan, rasa segan, dan respon positif dari pihak lain serta meningkatkan kepercayaan negara dalam mediamedia interaksi internasional. Naval diplomacy pada

hakekatnya dapat dilaksanakan secara maksimal jika kekuatan yang digunakan dalam operasi tersebut relevan, dalam arti dapat memberikan pengaruh terhadap prestise yang ingin dicapai. Pelaksanaan Diplomasi TNI AL sebagai bentuk *naval diplomacy* penting dilakukan mengingat dampak dari *Naval Diplomacy* dapat memberikan makna yang berbeda-beda Menurut Ken Booth, terdapat setidaknya 6 (enam) aspek utama yang dapat dianalisis untuk mendeskripsikan suatu naval diplomacy, yaitu 1) kuasa dan pengaruh, 2) influencers dan influenced, 3) assets dan liabilities, 4) naval influence, 5) taktik, dan 6) efek yang ditimbulkan oleh *naval diplomacy*.

Analisis Data

Dinamika yang terjadi di kawasan Pasisik Selatan yang menimbulkan suatu ancaman terhadap kedaulatan NKRI dengan memunculkan isu tentang pelanggaran HAM di Papua serta usaha dari kelompok-kelompok separatis papua untuk mencari dukungan melalui negara-negara di kawasan pasifik selatan perlu ditanggapi secara tepat oleh pemerintah. Untuk itu Indonesia mulai mengubah hubungannya dengan kawasan Pasifik sejak 20 tahun terakhir melalui kebijakan luar negeri "Menoleh ke Timur" (*Look East Policy*), merupakan salah satu bentuk upaya dalam menjaga hubungan dengan negara-negara di kawasan Pasifik.

Pelaksanaan diplomasi TNI AL di kawasan Pasifik selatan merupakan salah satu bentuk dari diplomasi pertahanan dalam mendukung kebijakan pemerintah di kawasan Pasifik Selatan. Seperti dijelaskan oleh Booth salah satu fungsi diplomasi Angkatan Laut yang paling sering digunakan oleh Angkatan Laut dunia adalah fungsi *prestise*, seperti telah dijelaskan pada bagaian sebelumnya. Kegiatan diplomasi TNI AL dengan melaksanakan kunjungan negara

(*Port visit*) dengan menunjuk kan kekuatan serta keramahan dapat sebagai penghormatan terhadap suatu negara. Kerjasama TNI AL dalam bidang operasi dan latihan dengan negara lain dapat meningkatkan hubungan bilateral, dan kehadiran TNI AL di suatu kawasan dapat eksistensi Indonesia di kawasan tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi diplomasi TNI AL di Kawasan Pasifik Selatan. Keberhasilan pelaksanaan diplomasi TNI AL di Kawasan pasifik Selatan dipengaruhi oleh faktor yang mendukung serta menghambat pelaksanaan diplomasi.

Faktor yang mendukung: Kebijakan negara Indonesia *Look to east*; Kebijakan Poros Maritim Dunia; Kemampuan diplomasi yang dimiliki TNI AL; Kebijakan pemerintah dalam penanganan permasalahan gerakan separatis di Papua

Faktor yang menghambat: Adanya negara-negara Pasifik Selatan yang mendukung gerakan separatis untuk kemerdekaan di Papua; Isu pelanggaran HAM di Papua yang selalu dikemukakan Aktifis separatis Papua melalui forum - forum Internasional; Masih terbatasnya hubungan diplomatik dengan negara-negara Pasifik Selatan; Adanya keterlibatan pihak ketiga, *state actor* ataupun *nonstate actor* yang mempunyai kepentingan di papua.

PEMBAHASAN

Bentuk diplomasi TNI AL yang dapat dilaksanakan di kawasan Pasifik Selatan antara lain: pertemuan pejabat tinggi TNI AL, *Navy To Navy Talks* (NTNT), *information sharing*, bidang pendidikan, serta kerja sama bidang operasi dan latihan. Kegiatan diplomasi lain berupa kunjungan kapal perang (*port visit*) ke negara-negara pasifik selatan. Pertemuan antar pejabat dan NTNT dapat dilaksanakan dengan negara-negara pasifik selatan sebagai langkah awal yang dalam pelaksanaan

diplomasi TNI AL, dari pelaksanaan NTNT selanjutnya dapat dibahas kegiatan bilateral apa saja yang dapat dilaksanakan. *Information sharing* dilaksanakan dalam hal berbagi informasi strategis di kawasan yang menyangkut hubungan bilateral. Dalam bidang pendidikan dapat dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada personel Angkatan Laut di negara pasifik selatan untuk mengikuti pelatihan di lembaga pendidikan TNI AL, kegiatan operasi dan latihan dapat dilaksanakan sebagai bentuk latihan bersama dan operasi bersama secara tidak langsung menunjukkan kekuatan TNI AL kepada negara-negara di kawasan tersebut. Kegiatan port visit dapat dilaksanakan sebagai upaya untuk menjaga hubungan dan menunjukkan kemampuan TNI AL yang mampu melaksanakan operasi sampai dengan wilayah samudera pasifik. Menurut Booth, terdapat 3 taktik dasar pengerahan armada sebagai upaya Diplomasi angkatan Laut dalam kerangka *naval influence politics*, yaitu *naval aid*, *operational calls*, dan *specific goodwill visits*. Bentuk naval diplomacy melalui *naval aid* tersebut dapat membangun akses dan hubungan kerjasama dengan negara. *Operational calls* secara teoritik dapat dimanfaatkan untuk mengesankan negara yang dituju melalui sikap dari para awak kapal, kecanggihan teknologi yang terdapat dalam kapal perang, dan hiburan yang diberikan kepada pihak-pihak dalam negara target. Lebih lanjut, kunjungan seperti ini dapat dimanfaatkan secara bertahap untuk membangun prestise dan posisi tawar negara pengunjung, sehingga meningkatkan pengaruh terhadap negara yang dikunjungi. sebagai bentuk *specific goodwill visit*, kegiatan *port visit* melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat diplomatik, seperti menyelenggarakan *courtesy call*, *cocktail party* dan kegiatan seremonial lain yang diharapkan dapat

menjalin hubungan emosional antar personel kedua negara.

Pelaksanaan diplomasi TNI AL di Pasifik Selatan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi harus dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan diplomasi TNI AL di Pasifik Selatan. Keberhasilan dalam pelaksanaan diplomasi TNI AL akan berdampak luas dalam hubungan antar negara maupun multi negara dalam suatu kawasan.

Faktor yang mendukung pelaksanaan diplomasi TNI AL di kawasan Pasifik Selatan. Dengan adanya aktifitas yang dilaksanakan oleh gerakan separatis papua di negara-negara Pasifik selatan pemerintah telah melaksanakan berbagai strategi diplomasi ke negara-negara pasifik selatan. Salah satu kebijakan yang diambil adalah *Look to east* atau melihat ke arah timur dapat diartikan untuk meningkatkan perhatian dan hubungan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, salah satunya dengan kawasan Pasifik selatan. Kebijakan tersebut salah satu tujuannya adalah untuk meng *counter* aktifitas negara-negara yang mendukung kemerdekaan Papua. Diplomasi TNI AL di kawasan Pasifik Selatan merupakan salah satu kegiatan dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Diplomasi TNI AL adalah bagian dari diplomasi negara sehingga diperlukan kolaborasi dan elaborasi/keterpaduan di dalamnya dengan K/L terkait. Contoh dalam hal ini adalah penggunaan alutsista KRI sebagai sarana sedangkan instansi K/L lainnya seperti Kemendikbud, Kemendiknas, Kemenkes dan Kemenparekraf dapat menjadi *leading sector* kegiatan akan lebih efektif dalam keberhasilan dalam meraih tujuan dari diplomasi. Selain itu di era Presiden Jokowi telah mencanangkan kebijakan Indonesia sebagai poros maritim dunia hal ini merupakan faktor pendukung bagi TNI AL dalam mengembangkan kemampuan diplomasinya. Kebijakan

tersebut mengarah kepada pembangun di bidang Maritim untuk menjadikan indonesia sebagai negara maritim yang kuat dalam berbagai sektor kemaritiman. Kekuatan TNI AL yang handal merupakan modal dalam pelaksanaan diplomasi TNI AL. *Naval Presence /* kehadiran TNI AL yang kuat di suatu kawasan dapat memberikan efek *deterrence* dan *prestise* bagi negara di suatu kawasan. Dalam pelaksanaan diplomasi, TNI AL telah melaksanakan berbagai kegiatan diplomasi antara lain kegiatan operasi dan latihan bersama dengan negara-negara ASEAN, Amerika, Australia dan negara lainnya, satgas Maritim TNI yang tergabung dalam MTF UNIFIL, kegiatan *port visit* IME (*Indonesian Maritime Envoy*), operasi Kartika Jala Krida (KJK) dan kegiatan lain. Sampai saat ini kegiatan diplomasi TNI AL berupa operasi dan Latihan di Pasifik Selatan masih ada. Pemberian otonomi khusus pada provinsi Papua barat dan Papua merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan dan memajukan Papua. hal tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah RI dalam menghadapi permasalahan di papua. pemerintah telah berusaha untuk menciptakan situasi yang kondusif di Papua dan meredam berbagai isu yang disampaikan aktifis pro separatis papua di forum-forum internasional. Dalam pelaksanaan diplomasi ke Pasifik selatan TNI AL dapat juga menyampaikan program pemerintah kepada negara-negara di kawasan Pasifik selatan untuk merubah opini yang berkembang di kawasan tersebut tentang isu di Papua.

Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan diplomasi TNI AL di Pasifik Selatan. Beberapa negara di kawasan pasifik selatan antara Vanuatu, Kepulauan Solomon dan Kaledonia Baru secara terbuka telah mendukung gerakan kemerdekaan di papua, negara-negara tersebut telah mendukung kemerdekaan Papua dengan ikut

menyuarakan dukungan pada forum-forum internasional, dalam melaksanakan diplomasinya ke Pasifik Selatan TNI AL harus tetap berpedoman kepada kebijakan pemerintah terhadap negara-negara tersebut, pada hakikatnya diplomasi yang akan dilaksanakan TNI AL adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwasanya Indonesia merupakan negara yang cinta damai akan tetapi lebih cinta pada kedaulatan negara. Diplomasi TNI AL dapat menunjukkan niat baik Indonesia dalam menalin hubungan dengan negara-negara di kawasan pasifik selatan dengan membawa misi damai sedangkan disisi lain dapat menunjukkan kekuatan yang dimiliki Indonesia sehingga memberikan efek deterrence kepada negara yang dikunjungi juga sebagai suatu isyarat kepada negara di suatu kawasan bahwa Indonesia mampu hadir di kawasan tersebut. Isu yang selalu disampaikan pada dunia Internasional oleh Papua Aktifis pendukung kemerdekaan Papua sampai dengan saat ini masih selalu berupaya untuk mengangkat isu tentang Papua di dunia internasional hal tersebut harus menjadi perhatian TNI AL dalam melaksanakan diplomasi ke kawasan tersebut. Information sharing dengan negara-negara yang telah berhubungan baik Indonesia dapat dijadikan sarana untuk mengambil strategi yang tepat dalam melaksanakan diplomasi TNI AL. Hambatan berikutnya adalah hal yang tidak kalah penting yaitu terbatasnya hubungan diplomasi TNI AL di kawasan pasifik selatan, keterbatasan ini terjadi karena negara-negara di kawasan tersebut dikarenakan secara geografis wilayah Pasifik Selatan merupakan wilayah kepulauan yang tersebar di samudera pasifik sehingga sarana transportasi dan akses komunikasi yang dimiliki juga terbatas. Dalam pelaksanaan diplomasi TNI AL hal ini dapat menjadikan dijadikan kesempatan untuk dapat mengumpulkan data-data tentang kondisi sosial, budaya, geografis serta

mengukur kekuatan yang dimiliki negara-negara tersebut sehingga dapat menciptakan peluang tentang pelaksanaan diplomasi pemerintah pada bidang yang lain. dalam era globalisasi saat ini dimana negara-negara besar yang memiliki kekuatan akan berupaya untuk memperluas jaringan yang dimilikinya. Kemampuan secara ekonomi merupakan alasan yang paling tepat negara-negara besar dapat diterima oleh negara-negara di kawasan pasifik selatan, selain itu Papua merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam baik yang sudah di eksplorasi maupun yang belum di eksplorasi, hal tersebut juga menimbulkan niat negara-negara tersebut untuk dapat potensi sumberdaya alam Papua, yang bertindak sebagai pihak ketiga yang memperkeruh situasi di Papua melalui negara-negara di pasifik selatan, baik dilakukan oleh *state actor* maupun *non state actor*.

KESIMPULAN

- a. Diplomasi dengan negara-negara di Pasifik Selatan merupakan upaya Indonesia dalam menjaga hubungan baik dengan negara-negara di kawasan tersebut. Hubungan ini juga dapat digunakan sebagai cara untuk meredam isu-isu kemanusiaan yang selalu di lontarkan oleh beberapa negara maupun organisasi non pemerintah di kawasan tersebut guna menjaga kedaulatan NKRI. Pelaksanaan diplomasi ke Pasifik bukan hanya menjadi tugas Kementerian Luar Negeri tetapi membutuhkan kolaborasi dan eraborasi antara Kementerian Lembaga terkait.
- b. TNI AL sebagai komponen utama dalam pertahanan negara merupakan bagian

dari kekuatan bangsa yang memiliki salah satu tugas diplomasi seperti yang tertuang pada UU Nomor 34 tahun 2004. Kemampuan diplomasi Angkatan Laut atau lebih dikenal *Naval Diplomacy* dapat digunakan untuk mendukung kebijakan negara khususnya dalam masa negosiasi maupun dalam interaksi internasional. Kekuatan Angkatan Laut mampu membentuk kondisi psikologis di tingkat domestik, memproyeksikan kekuatan armada laut yang mengesankan dapat membentuk citra umum negara. Diplomasi TNI AL dalam masa damai ke negara-negara Pasifik Selatan dapat memberikan pengaruh positif dalam hubungan diplomatik dan dapat menunjukkan prestise dan kredibilitas negara di mata Internasional. Akan tetapi harus didukung dengan kekuatan dan kemampuan yang relevan yang dimiliki oleh TNI AL.

- c. Pelaksanaan diplomasi TNI AL harus memperhatikan faktor-faktor yang mendukung serta yang menjadi kendala sehingga dapat tepat sasaran. Salah satu sasaran diplomasi TNI AL di pasifik selatan adalah meningkatkan kerjasama pertahanan dengan negara-negara pasifik selatan dalam mendukung kebijakan negara di kawasan tersebut melalui kegiatan pertemuan antar pejabat tinggi AL, *Navy To Navy Talks* (NTNT), *information sharing*, bidang pendidikan, kerja sama bidang operasi dan latihan

dan kegiatan *port visit*. Diplomasi TNI AL juga dapat berbentuk bantuan kemanusiaan seperti pengiriman bantuan dalam penanggulangan bencana di kawasan Pasifik Selatan. pada pelaksanaannya dibutuhkan Kolaborasi serta elaborasi yang solid antara TNI AL dengan kementerian serta lembaga terkait dalam pelaksanaan diplomasi ke kawasan Pasifik Selatan sehingga diharapkan dapat mengatasi permasalahan isu separatist di papua dan dapat menjaga stabilitas keamanan nasional sehingga dapat menjaga kedaulatan NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

Amidoni, A. (2018, Desember 13). *Organisasi Papua Merdeka yang menuntut pemisahan Papua dari Indonesia, apa dan siapa mereka?* Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46539502>

Biro Humas Setjen Kemhan. (2021, 13). *Menhan Sampaikan Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021*. Retrieved from Kemenhan: <https://www.kemhan.go.id/2021/01/13/menhan-sampaikan-kebijakan-pertahanan-negara-tahun-2021-diantaranya-melanjutkan-penanganan-covid-19.html>

Damarjati, D. (2019, Juli 18). *Jejak Benny Wenda: Kabur dari Penjara Diburu Interpol, Hidup di Inggris*. Retrieved from detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-4630184/jejak-benny-wenda-kabur-dari-penjara-diburu-interpol-hidup-di-inggris>

d'Hooghe, I. (2007). *The Rise of China's Public Diplomacy*. Netherlands: Institute of International Relations Clingendael.

Donald M. Snow, E. B. (2000). *International Relations: The Changing Contours of Power*. New York: Longman.

Hendra Kurniawan, Rully Riono, I Made Wira

Diplomasi Tni Al Di Kawasan Pasifik Selatan Dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah(Hal 728-741)

Holland, W. J. (2012). *The Navy*. Washington: Naval Historical Foundation.

Till, G. (2018). *Cass Series: Naval Policy and History*. London: Joint Services Command and Staff College and Defence Studies.

Kusmanto, H. (2016). Mewujudkan Stabilitas Keamanan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurnal Kajian Lemhanas RI*.

Ministry of Communication. (2017, September 30). *FIJI SIGNS MOU IN DEFENCE COOPERATION WITH INDONESIA*. Retrieved from The Fijian Government: <https://www.fiji.gov.fj/Media-Centre/News/FIJI-SIGNS-MOU-IN-DEFENCE-COOPERATION-WITH-INDONES>

Muhammad, R. A. (2014, Oktober 2). 'K' Untuk Kemesraan. *Buletin Jendela*, pp. 4-5.

Mukarom, V. F. (2020, September 28). *Diingatkan Jangan Ikut Campur, Sudah Beberapa Kali Vanuatu Singgung Isu Papua di Sidang PBB*. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/28/133200465/diingatkan-jangan-ikut-campur-sudah-beberapa-kali-vanuatu-singgung-isu?page=all>

Pratiwi, T. D. (2017). Relevansi Penyusunan Teori Diplomasi Dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic World and Politics*, 113.

Pratomo, E. (2019, September 2). *Referendum Dalam Persepektif Hukum Internasional*. Retrieved from Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/opini/256927/referendum-dalam-persepektif-hukum-internasional>

Raharjo, T. A. (2019, September 3). *Lingkaran Konsentris Politik Luar Negeri Indonesia Sebagai Upaya Pencapaian Kepentingan Nasional*. Retrieved from Jurusan HI: <https://jurusannya.com/lingkaran-konsentris-politik-luar-negeri-indonesia-sebagai-upaya-pencapaian-kepentingan-nasional/>

Rowlands, K. (2012). *“Decided Preponderance at Sea”: Naval Diplomacy in Strategic Thought*. Newport: Naval War College.

Tarigan, M. (2015, Juni 27). *Indonesia Jadi Anggota Negara Melanesia, Ini Alasannya*. Retrieved from Tempo.co: <https://dunia.tempo.co/read/678802/indonesia-jadi-anggota-negara-melanesia-ini-alasannya>